

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Andasmita, Komar. Notaris dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya. Bandung: Sumur, 1981.
- Adjie, Habib. "Penegakan Etika Profesi Notaris dari Perspektif Pendekatan Sistem." *Media Notariat*, April-Juni 2002.
- _____. *Hukum Notaris di Indonesia – Tafsiran Tematik Terhadap UU Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2008.
- _____. *Sanksi Perdata Dan Administrasi Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*. Bandung: PT. Refika Aditama, 2009.
- Andasmita, Komar. Notaris dengan Sejarah, Peranan, Tugas Kewajiban, Rahasia Jabatannya. Bandung: Sumur, 1981.
- Adegustara, Frenadin. *Hukum Administrasi Negara, Buku Ajar*. Padang: Universitas Andalas, 2005.
- Bertens, K. *Etika*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Black, Henry Campbell. *Black's Law Dictionary*. Amerika Serikat: West Publishing Co., 1979.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Diana, Putu Vera Purnama. *Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta Berdasarkan Pemalsuan Surat oleh Para Pihak*. Bali: Universitas Udayana, 2016.
- Hadjon, Phillipus M. "Makalah Tentang Wewenang." Universitas Airlangga, Surabaya, 1986.
- Hamzah, Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Hardjasoemantri, Koesnadi. *Hukum Tata Lingkungan*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1998.
- Ibrahim, Johnny. *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia, 2012.

Indroharto. Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara, Buku I. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

Kelsen, Hans. Pengantar Teori Hukum. Jakarta: Kompas, 2007.

Lamintang, P.A.F. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1996.

Lubis, M. Solly. Filsafat Ilmu dan Penelitian. Bandung: Mandar Maju, 1994.

Marhijanto, Bambang. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Populer. Surabaya: Bintang Ilmu, 2004.

Marzuki, Peter Mahmud. Pengantar Ilmu Hukum. Cetakan Kedua, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.

_____. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup, 2010.

Nasution, Bahder Johan. Metode Penelitian Ilmu Hukum. Bandung: Mandar Maju, 2008.

Notodisoerjo, R. Soegondo. Hukum Notarial Di Indonesia Suatu Penjelasan. Jakarta: CV. Rajawali, 2002.

Rahardjo, Satjipto. Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana. Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1998.

Salim, HS. Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

_____, dan Erlies Septiana Nurbani. Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis, Buku Kedua. Jakarta: Rajawali Pers.

Sjaifurrachman, dan Habib Adjie. Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta. Bandung: Mandar Maju, 2011.

Soekanto, Soejono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Universitas Indonesia-Press, 2005.

Van Mourik, M.J.A. Civil Law and the Civil Law Notary in a Modern World. Jakarta: Media Notariat, 1992.

B. Jurnal

Firmansyah, Yanuar Rozi. "Kekuatan Hukum Akta Perdamaian yang dibuat di Hadapan Notaris dan Putusan Akta Perdamaian Pengadilan." Jurnal Cakrawala Hukum, Vol. 8, No. 2, 2017.

Patahna, Muchlis. "Apa Akar Masalahnya Banyak Notaris Tersandung Kasus." Renvoi, Nomor 1.37.IV, Juni 2006.

Rochim, Bayu Nur, dan Adi Sulistiyono. "Tinjauan Yuridis tentang Kedudukan Akta Perdamaian yang dibuat di Hadapan Notaris Sebagai Alat Bukti yang Diabaikan Oleh Hakim dalam Penyelesaian Sengketa Perdata." Jurnal Repertorium Universitas Sebelas Maret, Vol. 5, No. 1, 2018.

Syamsir, Elita Rahmi, dan Yetniwati. "Prospek Cyber Notary Sebagai Media Penyimpanan Pendukung Menuju Profesionalisme Notaris." Recital Review, Vol. 1.

C. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penjatuhan Sanksi Administratif Terhadap Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan, Perpindahan, Pemberhentian, dan Perpanjangan Masa Jabatan Notaris

